



**RENCANA  
KINERJA  
TAHUNAN  
BAPPEDA KOTA BANDA  
ACEH  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dapat tersusun dengan baik.

RKT merupakan komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen RKT Tahun 2020. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi segenap aparatur Bappeda Kota Banda Aceh pada khususnya dan stakeholder pembangunan pada umumnya sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Banda Aceh.

**Banda Aceh, Januari 2020**  
**Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh**

**NILA HERAWATI, SE, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19670929 199403 2 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Gambaran Umum BAPPEDA.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	1
1.3. Tujuan Penyusunan RKT.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	11
2.1. Visi dan Misi.....	11
2.2. Tujuan, Sasaran dan Program.....	14
<b>BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	20
3.1. Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020.....	20
3.2. Penetapan Kinerja.....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	30

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022
2. Lampiran II Penetapan Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020
3. Struktur Organisasi

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Umum BAPPEDA**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan lembaga yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan perencanaan, dibutuhkan suatu dokumen Rencana kerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman yang dapat mengawal pencapaian seluruh target kinerja yang telah direncanakan sehingga kegiatan penyusunan rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen RKT merupakan tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. RKT juga menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala Bappeda Kota Banda Aceh kepada Walikota.

Secara detail, RKT Bappeda tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Bappeda pada tahun 2020. Seluruh program dan kegiatan dalam dokumen ini merujuk pada Renja Bappeda tahun 2020 dan Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022. RKT menjadi dokumen penting bagi Bappeda untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilannya dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya di tahun 2020.

## **1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh diatur sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Berikut adalah rincian susunan struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh.

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - f. Kepala Subbagian;
  - g. Kepala Subbidang;
  - h. UPTB GIS; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
  
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
  - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
  - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
  - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
  - c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
  
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
  - a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi; dan
  - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
  - Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
  - Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

### 1.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Bappeda Kota Banda Aceh di dukung oleh pegawai, baik yang berstatus PNS maupun Kontrak (Non PNS). Pada bulan Januari 2020 jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebanyak 62 orang. 48 orang diantaranya berstatus PNS sedangkan 14 lainnya berstatus pegawai Kontrak. Bappeda memiliki pegawai yang cukup berpengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, terlihat dari level pangkat dan golongan PNS yang ada. Jumlah terbesar PNS Bappeda berada pada golongan III/d yaitu sebanyak 19 orang, diikuti dengan golongan IV/a dan III/c masing-masing sebanyak 9 dan 8 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan golongan dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Banda Aceh Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian pada Tahun 2020**

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	<b>PNS</b>				
1	IV/d	-	-	-	
2	IV/c	-	-	-	
3	IV/b	1	1	2	
4	IV/a	3	6	9	
5	III/d	13	6	19	
6	III/c	4	4	8	
7	III/b	4	2	6	
8	III/a	-	1	1	
9	II/d	-	-	-	
10	II/c	1	1	2	
11	II/b	-	-	-	
12	II/a	1	-	1	
13	I/d	-	-	-	
	Jumlah PNS	27	21	48	
	<b>Non PNS</b>	9	5	14	
	<b>JML PNS + NON PNS</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	

Dari segi pendidikan, pegawai Bappeda rata-rata memiliki jenjang pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan ini menjadi salah satu faktor penunjang organisasi Bappeda di dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Jumlah PNS Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak berada pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 17 orang. Tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dengan 1 orang pegawai dan tertinggi pada S3 yaitu sebanyak 1 orang. Sementara 10 orang dari total 14 orang pegawai NON PNS pada Bappeda Banda Aceh memiliki pendidikan setingkat S1. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda rata-rata memiliki pendidikan tinggi yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda sebagai sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh.

**Tabel.1.2.**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah NON PNS
1	S 3	1	-
2	S 2	17	1
3	S 1	21	10
4	D IV	1	-
5	D III	2	-
6	SLTA	5	2
7	SLTP	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>14</b>

Aspek penunjang pelaksanaan tugas lainnya adalah sarana dan prasarana. Pada Tahun 2020, Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset yang cukup memadai. Bappeda memiliki bangunan gedung seluas 520,75 m<sup>2</sup>, dengan luas lahan seluas 1.451 m<sup>2</sup>. Pegawai Bappeda juga didukung dengan sejumlah peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas, genset, computer, printer dan peralatan kerja lainnya dengan total nilai asset sekitar 3,8 Milyar Rupiah. Selain itu, Bappeda juga telah memiliki jaringan solar panel yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung gerakan hemat energi dan konsep Banda Aceh sebagai Green City. Jenis sarana dan prasarana beserta konversi nilai aset Bappeda Kota Banda Aceh terlihat pada table 1.3. berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	841	3.879.853.070
3	BANGUNAN GEDUNG	4	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	3	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
Jumlah		<b>852</b>	<b>13.886.109.070</b>

### 1.2.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Berikut adalah uraian tugas, fungsi dan kewenangan Bappeda beserta seluruh jajarannya, seperti diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Kewenangan:

- a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;



- c. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
- f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
- g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
- j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

#### ▪ **Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### ▪ **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi**

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi

program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan**

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

▪ **Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mengkoordinasi, memfasilitasi, sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.3 Tujuan Penyusunan RKT**

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah:

- ) Sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2020; dan
- ) Sebagai bahan dan salah satu dasar acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh OPD untuk menentukan arah dan strategi organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya dan potensinya serta mempertimbangkan kendala dan hambatan yang dihadapi. Rencana strategis organisasi pemerintahan berorientasi pada hasil dan berjangka waktu 5 (lima) tahun serta merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022 disusun untuk mendukung perwujudan visi dan misi Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022. Dokumen ini juga menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, sehingga tercipta keharmonisan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Namun demikian diperlukan adanya sistem perencanaan desentralisasi yang menjangkau kebutuhan riil masyarakat dan memadukan dengan program pemerintah. Dengan adanya paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

##### **2.1.1 Visi**

Perumudan Visi dan Misi merupakan langkah penting dalam proses perencanaan strategis. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Visi menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Banda Aceh, sesuai arahan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 memuat berbagai strategi untuk mendukung pencapaian Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yaitu: **“Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah”**. Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh dalam jangka menengah. Visi jangka menengah ini disusun dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata kunci yaitu **“GEMILANG”** dan **“BINGKAI SYARI’AH.”** Gemilang artinya adalah untuk menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah memberikan makna bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan dilakukan dalam bingkai-bingkai Syariat Islam.

### **2.1.2 Misi**

Sebagai upaya perwujudan Visi Kota Banda Aceh, maka perlu diuraikan kedalam berbagai rumusan Misi Kota Banda Aceh. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.  
Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.  
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat  
Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.  
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.  
Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.



## 2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

### 2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Pelaksanaan tupoksi Bappeda terdapat pada di Misi ke-5 (Lima) dalam RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017 – 2022, yaitu **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**. Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah **Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif**.

### 2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dimana dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan tertentu secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022. Adapun sasaran strategik yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Banda Aceh adalah **Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif**.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.  Indikator: Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan Kota	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	78% (144 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	80% (148 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	82% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)	84% (155 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.1.2. Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
		1.1.3. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)	100% (44 OPD)
		1.1.4. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	70% (14 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	75% (15 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)	85% (17 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.1.5. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)	34% (92 Usulan dari 270 Usulan)	35% (95 Usulan dari 270 Usulan)	36% (97 Usulan dari 270 Usulan)	37% (101 Usulan dari 270 Usulan)

### **2.2.3 Program Kerja**

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT dengan memperhatikan dokumen Renstra tahun 2017-2022 yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK meliputi:

#### **1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik.
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- 1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang.
- 1.10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

#### **2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

#### **3. Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 3.1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
- 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

#### **4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

**Program/Kegiatan Urusan Wajib:**

**1. Pengembangan Data dan Informasi**

- 1.1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
- 1.2. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 1.3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 1.4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS).
- 1.5. Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh.
- 1.6. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

**2. Kerjasama Pembangunan**

- 2.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

**3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

- 3.1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

**4. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**

- 4.1. Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
- 4.2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang.

**5. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 5.1. Penyusunan Rancangan RPJPD.
- 5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD.
- 5.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- 5.4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5.5. Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- 5.6. Penyelenggaraan Musrena.
- 5.7. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 5.8. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender (PPRG).

## **6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- 6.1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

## **7. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

- 7.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan.
- 7.2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan.
- 7.3. Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- 7.4. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **3.1. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2020**

Bappeda Kota Banda Aceh menyusun program dan kegiatan dalam RKT 2020 dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh. Bappeda pada Tahun anggaran 2020 akan melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
3. Penyediaan alat tulis kantor.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
6. Penyediaan makanan dan minuman.
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
8. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

##### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

##### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

**d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

**e. Program Pengembangan Data Informasi**

Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan.
2. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
3. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS).
4. Penyelenggara Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan.

**f. Program Kerjasama Pembangunan**

Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

**g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

**h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar**

Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 1(satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

**i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:



1. Penyusunan Rancangan RPJMD.
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Penyelenggaraan Musrena.
5. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender (PPRG).

**j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

**k. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Grand Design Pembangunan kependudukan.
2. Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			4 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis cetak & Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
			5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan
			8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	14 jenis		
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali		
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali		
			4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	62 stel/orang		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	5 org		
<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</b>	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 jenis buku
					1.1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen penyusunan rancangan RPJMD	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.1.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		2.2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.2.1 Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
			2.2.2 Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen program perencanaan tujuan pembangunan berkelanjutan	1 dokumen
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1 Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah lembaga yang menjalin kerjasama	5 lembaga
		3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Laporan
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		3.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.4.1 Pendampingan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah kegiatan OPD yang telah memiliki Gap dan GBS	16 kegiatan
	4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
4.1.2 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi			Jumlah laporan data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 Laporan	
4.1.3 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)			Jumlah Peta Spatial (UPTB GIS)	1 peta	
4.1.4 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan			Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	
4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah		4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
			5.1.2 Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang

### 3.2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab atau kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tahun 2020 alokasi belanja langsung Bappeda Banda Aceh sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh sebesar Rp. 4.905.907.651,- dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	80% (148 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	75% (15 Indikator dari 20 Indikator Program RPJMD)
		2.1	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	35% (95 Usulan dari 270 Usulan)

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran per Program Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.599.006.910
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	505.603.360
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.200.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	15.000.000
5	Program pengembangan data informasi	1.078.278.885
6	Program Kerjasama Pembangunan	166.147.030
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	167.138.374
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	85.623.690
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.013.694.262
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	111.832.150
11	Program Perencanaan Pembangunan sosial Budaya	128.382.990
<b>JUMLAH</b>		<b>4.905.907.651</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana program dan kegiatan pada instansi Bappeda berikut target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. Dokumen ini juga menggambarkan kondisi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung yang merupakan aspek yang cukup penting bagi Bappeda dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang direncanakan. Dokumen RKT ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjadi bahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020.

Selanjutnya, dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh khususnya bagi pihak-pihak terkait yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membangun Kota Banda Aceh yang gemilang.

Lampiran Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
						3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
						4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
						5 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
						6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						7 Penyediaan Makanan dan Minuman
						8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
						9 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
						10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
						3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
						4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
					Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan mesin atau kartu absensi
						2 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Kebijakan		Program		Kegiatan			
								3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD			
									1.1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD		
										1.1.3	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	
						2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD		2.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD
									2.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
									2.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
											2.3.2	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
											2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan
											2.3.4	Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
						3	Persentase OPD yang Renjanya		3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan			
			selaras dengan RKPDP		3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
					3.3	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	
							3.3.2	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang	
			4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
							4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	
							4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	
							4.1.4	Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	
							4.1.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	
							4.1.6	Penyusunan Buku Statistik Banda Aceh dan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh	
					4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
			5	Persentase usulan	Pemeliharaan	5.1	Program Perencanaan	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
			masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	database yang terkoneksi dengan OPD	Pembangunan Daerah	5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis cetak & Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7986 porsi
			7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan
			8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	14 jenis		
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali		
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	120 kali		
			4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	508 kali		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	62 stel/orang		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	5 org		
		<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</b>	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
1.1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD						Jumlah dokumen penyusunan rancangan RPJMD	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.1.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		2.2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.2.1 Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
			2.2.2 Pengendalian Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah dokumen program perencanaan tujuan pembangunan berkelanjutan	1 dokumen
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1 Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah lembaga yang menjalin kerjasama	5 lembaga
			3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
		3.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.4.1 Pendampingan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah kegiatan OPD yang telah memiliki Gap dan GBS	16 kegiatan
	4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
			4.1.2 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 Laporan
			4.1.3 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial (UPTB GIS)	1 peta
			4.1.4 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
			5.1.2 Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	207 orang



